

**STRATEGI TIM GNKPA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
DALAM UPAYA
MENSOSIALISASIKAN GERAKAN
NASIONAL KEMITRAAN
PENYELAMATAN AIR (GNKPA) PADA
PUBLIK EKSTERNAL**

**SURYA UTAMA
MAHASISWA PASCASARJANA**

ABSTRACT

SURYA UTAMA, NIM. 0802016.039, Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Konsentrasi Kebijakan Publik, Universitas Mulawarman Samarinda. Judul Penelitian : Strategi Tim GNKPA Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Upaya Mensosialisasikan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) Pada Publik Eksternal. Dalam Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Drs. DB. Paranoan, M.Si. sebagai Pembimbing I dan Bapak Drs. Heryono Susilo Utomo, M.Si. sebagai Pembimbing II.

Pencanangan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) oleh Presiden RI pada tanggal 28 April 2005 dilatarbelakangi adanya kondisi krisis sumber daya air nasional. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air dan menekan permasalahan sumber daya air khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara serta memenuhi amanah UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber daya Air, maka diperlukan kegiatan pengelolaan sumber daya air berupa Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air.

Dari pernyataan tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui tanggapan publik eksternal sebagai indikator keberhasilan Tim GNKPA Kab. Kutai Kartanegara dalam upaya mengoptimalkan sosialisasi program nasional dan keberhasilan GNKPA di Kab. Kutai Kartanegara ditentukan oleh partisipasi dan komitmen seluruh masyarakat Kab. Kutai Kartanegara dalam menerapkan prinsip-prinsip

good/effective water and environmental governance secara sungguh-sungguh.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang ingin disajikan oleh peneliti berupa cerita dari para narasumber tentang pengalaman, opini, pengetahuan, tradisi, filsafat atau pandangan hidup seseorang. Dengan kata lain, penelitian dengan metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa uraian dalam bentuk tertulis atau lisan dari individu, kelompok maupun organisasi yang diamati.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Kecendrungan pelaksanaan program nasional yang selalu menunjukkan dan memberikan hasil yang tidak optimal. 2) Belum di terima dan dipahaminya apa itu GNKPA di masyarakat yang menghambat terlaksananya program GNKPA. 3) Adanya informasi dan masukan dari publik eksternal sebagai Langkah-langkah baru yang menjadi strategi Tim GNKPA Kab. Kutai Kartanegara dalam upaya mengoptimalkan kegiatan sosialisasi GNKPA di masa yang akan datang.

Untuk itu disarankan, agar 1) Pemerintah dan Tim GNKPA Kab. Kutai Kartanegara lebih proaktif memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan GNKPA. 2) Program GNKPA hendaknya dapat diterima, dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sepenuh hati sebagai bentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat akan kondisi sumber daya air yang merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 2.611.690 ha, memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar. Potensi sumberdaya tersebut terwujud dalam bentuk seperti sungai, danau, rawa, curah hujan yang tinggi dan air tanah. Potensi sumberdaya air tersebut merupakan bagian dari potensi Wilayah Sungai (WS) Mahakam yang merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional (PerMen PU No. 11/PRT/M/2006),

dengan sungai yang penting diantaranya Sungai Kedang Kepala, Sungai Belayan, Sungai Kedang Rantau, Sungai Jembayan, Danau Semayang, Danau Melintang, Danau Perian, dan Danau Kedang Rantau merupakan danau-danau yang memiliki ekosistem yang unik dan keanekaragaman hayati yang kaya. Sedangkan Delta Mahakam merupakan delta yang terluas dan memiliki bentuk kaki burung yang sudah terkenal di dunia.

Potensi sumber daya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Kutai Kertanegara dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya sebagai prasarana lalu lintas air, sumber air baku dan MCK, sumber air bagi irigasi, kegiatan kehutanan, kegiatan perkebunan, kegiatan industri, pengembangan hudi daya perikanan, kegiatan pertambangan, prasarana rekreasi dan pariwisata, dan juga mempunyai fungsi sosial.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya kesejahteraan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Kertanegara maka pemanfaatan sumberdaya air juga terus meningkat. Disatu sisi pemanfaatan potensi sumberdaya air terutama dalam kegiatan dari sektor unggulan pengembangan ekonomi seperti kehutanan, pertambangan, perikanan, perkebunan, industri, pariwisata dan pertanian sulit dihindari, tetapi disisi lain kegiatan tersebut mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan, diantaranya menurunnya kualitas air, kekeringan, erosi, sedimentasi, banjir, terbentuknya lubang-lubang bekas tambang, dan adanya lahan kritis. Luas hutan di Kabupaten Kutai Kertanegara semakin berkurang tiap tahun oleh kegiatan penebangan baik oleh perusahaan HPH, pembangunan hutan tanaman industri, pembangunan perkebunan kelapa sawit maupun penebangan liar dan kegiatan alih fungsi lahan menjadi lahan pertambangan, permukiman dan sebagainya sehingga banyak daerah aliran sungai mengalami kemerosotan luasnya daerah tangkapan air.

Berkurangnya daerah tangkapan air menyebabkan naiknya luasan lahan kritis, erosi-sedimentasi dan air limpasan tetapi menurunkan besarnya infiltrasi air yang menyebabkan aliran dasar sungai menjadi

lebih kecil. Sehingga pada saat musim hujan hampir seluruh DAS di Kabupaten Kutai Kertanegara mengalami kejadian banjir, sedangkan pada saat musim kemarau debit aliran menjadi sangat kecil dan pengaruh intrusi air asin menjadi meningkat. Banjir dan terbatasnya air baku telah menjadi permasalahan yang sangat meresahkan bagi sebagian wilayah di Kabupaten Kutai Kertanegara.

Permasalahan sumberdaya air di Kabupaten Kutai Kertanegara diperkirakan terus meningkat, dikarenakan :

- 1) Pemakai air yang meningkat dan beragam sehingga berbeda dalam kepentingan, maksud, cara memperoleh dan menguasai sumber-sumber air;
- 2) Sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa air merupakan sumberdaya yang terbarukan dan memanfaatkan air cenderung boros dan melalaikan unsur konservasi;
- 3) Lemahnya pemahaman para perencana pembangunan terhadap karakteristik sumberdaya air, sehingga pembangunan yang dilakukan cenderung mengabaikan siklus hidrologi dan mengurangi kemampuan air melakukan swapurifikasi ;
- 4) Pengelolaan sumberdaya air masih bersifat sektoral (belum terdapat pengelolaan sumberdaya air yang terpadu), koordinasi masih sangat lemah, dan penegakkan hukum pengelolaan sumberdaya air belum menjadi paradigma yang harus dijalankan;
- 5) Belum tersedianya rumusan kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya air;
- 6) Belum operasionalnya regulasi yang dalam pengelolaan sumberdaya air;
- 7) Tidak tersedianya wadah koordinasi dengan kewenangan yang memadai.

Untuk menghadapi permasalahan sumberdaya air tersebut di atas, diperlukan pokok-pokok pemikiran yang baru, yaitu :

- 1) Sumberdaya air harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh baik air hujan, air permukaan dan air tanah, kemudian juga sebagai suatu kesatuan mulai dari saat perencanaan, pelaksanaan

- pembangunan, pemantauan, hingga pengelolaan dengan meninggalkan pendekatan lama yang bersifat sektoral;
- 2) Sumberdaya air adalah bagian dari lingkungan ekologi lainnya yang tidak dapat dipisahkan seperti pertanian, kehutanan, perikanan, transportasi air, kesehatan, olah raga, rekreasi, budaya, agama, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya;
 - 3) Pembangunan keairan bukan lagi hanya membangun sarana prasarana untuk pengadaan air tetapi juga memasukkan unsur pemeliharaan daerah resapan, pemulihan kemampuan pemurnian kembali oleh badan air secara alami, serta pencegahan kerusakan tata air oleh industri, pertanian, dan urban yang tidak terkendali;
 - 4) Perlu keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dengan menyediakan iklim yang kondusif, kepastian hukum, dan sumberdaya manusia yang memadai;
 - 5) Perlu koordinasi pengelolaan sumberdaya air yang selama masih bersifat sektoral kedalam sebuah forum koordinasi yang dapat mengambil keputusan bersama, rencana implementasi dan evaluasi yang terukur dan didukung pembiayaan yang memadai;
 - 6) Terumuskannya kebijakan pengelolaan sumberdaya air di Kabupaten Kutai Kertanegara.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumberdaya air dan menekan permasalahan sumberdaya air di Kabupaten Kutai Kertanegara serta memenuhi amanah UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air, maka diperlukan kegiatan pengelolaan sumberdaya air berupa Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air.

Pencanangan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) oleh Presiden RI pada tanggal 28 April 2005 dilatarbelakangi adanya kondisi krisis sumber daya air yang diakibatkan oleh :

- 1) penambahan penduduk, industri, dan pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam;
- 2) penataan ruang, alih fungsi lahan dan penerapan hukum yang kurang terkendali;
- 3) Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang semakin meningkat;
- 4) kualitas air makin merosot akibat pencemaran;
- 5) pemanfaatan sumber daya air tidak efisien dan tidak adil akibat penggunaan air yang masih boros baik untuk keperluan irigasi, rumah tangga, maupun industri.

Dengan pencanangan GN-KPA diharapkan akan terwujud keterpaduan tindak dari berbagai sektor, wilayah, para pemilik kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu gerakan nasional bersama guna menentukan baik prioritas penanganan wilayah sungai maupun percepatan program penanganan yang diperlukan.

GNKPA pada intinya memuat komponen strategis, yaitu :

- 1) Penataan ruang, pembangunan fisik, pertanahan dan kependudukan;
- 2) Rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya air;
- 3) Pengendalian daya rusak air;
- 4) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air;
- 5) Penghematan penggunaan dan pengelolaan permintaan air;
- 6) pendayagunaan sumber daya air secara adil, efisien dan berkelanjutan.

Tindak lanjut peneanangan GNKPA, dilakukan Kesepakatan Bersama untuk Rehabilitasi Das Kritis melalui Konservasi Sumber Daya Lahan dan Air antar Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Pertanian tanggal 9 Mei 2007. Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai upaya terpadu mensinergikan kegiatan rehabilitasi DAS kritis untuk konservasi sumber daya lahan dan air.

Mengingat kerusakan DAS sebagian besar terjadi dibagian hulu, serta sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan sumber

daya air, serta akan menambah semakin kompleksnya permasalahan banjir, tanah longsor, dan kekeringan, maka implementasi kegiatan GNKPA diawali dari perbaikan DAS bagian hulu, melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya air. Untuk selanjutnya dalam panduan ini digunakan istilah konservasi dan air.

GNKPA di Kab. Kukar diawali pada saat pertemuan sosialisasi Tim GNKPA Propinsi tanggal 18 April 2007 di Ruang Rapat Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sungai terpilih adalah Sungai Tenggarong. Kemudian Rapat pembentukan Tim GNKPA kab. Kukar dengan SK BUPATI Tanggal 25 Juni 2007.

Organisasi

Pelaksanaan GN-KPA di tingkat nasional oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) dengan melibatkan lembaga-lembaga lain yang terkait, wakil dunia usaha dan wakil masyarakat, dan dibentuknya sekretariat harian GN-KPA tingkat nasional dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum selaku ketua harian TKPSDA

Pelaksanaan GN-KPA di lingkungan Direktorat Jenderal Departemen Terkait SDA, dapat dibentuk sekretariat harian GN-KPA dengan melibatkan para pemilik kepentingan, khusus membantu Direktur Jenderal masing-masing Departemen Terkait SDA serta berkoordinasi dengan sekretariat GN-KPA tingkat nasional, dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Departemen Terkait SDA.

Pelaksanaan GN-KPA di tingkat propinsi /Kab/Kota/Wilayah sungai oleh panitia Tata Pengaturan Air (PTPA) dengan melibatkan lembaga-lembaga lain yang terkait, wakil dunia usaha, dan wakil masyarakat, dan dibentuknya sekretariat harian GN-KPA, serta berkoordinasi dengan sekretariat GN-KPA tingkat nasional, dengan Surat Keputusan Sekretariat II TKPSDA.

Pendanaan

Dana untuk membiayai pelaksanaan GN-KPA berasal dari :

- 1) Anggaran pemerintah pusat

- 2) Anggaran Pemerintah Daerah
- 3) Partisipasi dunia usaha
- 4) Partisipasi masyarakat
- 5) Hibah dari lembaga keuangan nasional dan internasional.

Perumusan Masalah

Berangkat dari kenyataan di lapangan, maka permasalahan yang hendak dijawab penelitian ini adalah bagaimana strategi Tim Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) Kabupaten Kutai Kartanegara mengoptimalkan kegiatan sosialisasi GNKPA ini pada publik eksternal ?.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan agar penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas, maka perlu ditetapkan tujuannya yaitu ingin mengetahui tanggapan publik sebagai indikator keberhasilan Tim GNKPA Kab. Kutai Kartanegara dalam melaksanakan program nasional ini dan Keberhasilan GNKPA di Kabupaten Kutai Kartanegara ditentukan oleh partisipasi dan komitmen publik atau seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menerapkan prinsip-prinsip Good/Effective Water and Environmental Governance secara sungguh-sungguh.

Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui seberapa besar manfaat dari peran Tim dalam melaksanakan GNKPA Kab. Kutai kartanegara dalam melaksanakan program pemerintah ini serta berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka dapat diungkapkan bahwa manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut :

Manfaat Teoritis atau Akademis

Secara teoritis penelitian ini akan memberikan kontribusi atau manfaat bagi kalangan akademis antara lain :

- a. Secara umum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Mulawarman.
- b. Secara khusus, program studi S-2 Magister Ilmu Administrasi Negara Konsentarsi Kebijakan Publik.

Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan kontribusi atau manfaat mengenai gambaran tentang strategi Tim GNKPA Kab. Kutai Kartanegara dalam upaya mengoptimalkan kegiatan sosialisasi program nasional ini pada publik eksternal di Kab. Kutai Kartanegara. Dimana manfaat praktis di sini dapat ditunjukkan bagi beberapa kalangan antara lain :

- a. Tim GNKPA Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi dan Pusat.
- b. Pada perusahaan, instansi, organisasi maupun lembaga lainnya.
- c. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara khususnya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori dan Konsep

Sebelum masuk pada konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti mengutip beberapa pendapat para ahli tentang pengertian teori dan konsep itu sendiri. Kriyantono (2006 : 45) mengatakan bahwa "Teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut".

Bungin dalam Kriyantono (2007 : 73) menyatakan bahwa "Konsep adalah istilah yang mengekspresikan sebuah ide yang dibentuk dengan menggeneralisasikan objek atau hubungan fakta-fakta yang di peroleh dari pengamatan. Konsep di artikan sebagai generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu yang dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama".

Mengacu pada pendapat di atas, maka peneliti berpendapat bahwa konsep merupakan istilah atau definisi yang mendeskripsikan sebuah ide melalui hubungan fakta-fakta yang diperoleh, yang perlu diamati untuk mengetahui adanya hubungan sosial. Jadi, untuk melakukan suatu penelitian haruslah ditentukan terlebih dahulu

konsep dari penelitian tersebut. Hal ini dilakukan guna mempermudah penelitian.

Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA).

Direktorat Sungai, Danau dan Waduk Dirjen SDA Dept. Pekerjaan Umum, (2006 : 2), Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) merupakan suatu program pemerintah berawal dari hasil kesepakatan dialog nasional tanggal 28 Maret 2003, Deklarasi Nasional 11 Menteri dan Menko Kesra 23 April 2004 tentang Pengelolaan air yang efektif dalam penanggulangan bencana dan sebagai implementasi UU No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, pada momentum peringatan hari air dunia ke XIII tahun 2005, pada tanggal 27 April 2005 dideklarasikan terbentuknya wadah para pemilik kepentingan berkelanjutan SDA bernama Lembaga Jaringan Informasi Komunikasi Pengelolaan Sumber Daya Air (L JIK-PA) dan pada tanggal 28 April 2005 Presiden RI DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan GERAKAN NASIONAL KEMITRAAN PENYELAMATAN AIR (GNKPA) hingga tahun 2025 untuk program jangka panjangnya.

Pengertian Sosialisasi, Publikasi dan Hubungan Masyarakat Sosialisasi

akhir-akhir ini kata 'sosialisasi' memang sedang trend, sedikit-sedikit 'sosialisasi'. 'sosialisasi' ini, 'sosialisasi' itu, tak ada habisnya. yang beredar di masyarakat sejauh ini, sosialisasi adalah: proses pemberitahuan, pengumuman secara besar-besaran, mengabarkan pada khalayak ramai tentang sesuatu yang urgent, sesuatu yang harus segera diketahui khalayak. medianya bisa bermacam-macam. seminar, iklan pemberdayaan di media cetak maupun elektronik, juga poster-poster di pinggir jalan (pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi). Sosialisasi juga dapat disebut kegiatan yang bertujuan untuk memasyarakatkan suatu program pemerintah maupun swasta dan erat sekali dengan hubungan masyarakat untuk sebagai jembatan keberhasilan suatu program itu sendiri.

Soerjono Soekanto (<http://budakbangka.blogspot.com/2010/11/pengertian-sosialisasi.html>) Sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru.

Publikasi

Onong Uchjana (1989 : 292) menjabarkan pengertian publikasi (*publication*) sebagai berikut:

- 1) Publikasi adalah kegiatan menyebarluaskan informasi kepada khalayak dengan menggunakan media komunikasi.
- 2) Informasi sebagai hasil penyebarluasan melalui media komunikasi.

Philip dan Herbert dalam Rosady Ruslan (2005 : 54), mengatakan bahwa "Publikasi merupakan tugas hubungan masyarakat dalam menceritakan atau menyampaikan informasi sebanyak mungkin pesan atau informasi mengenai kegiatan perusahaan kepada masyarakat luas".

Kustadi Suhandang (2004 : 75) mengartikan "Publikasi sebagai kegiatan yang membuat publik tahu, lebih tepatnya diartikan sebagai pengolahan dan penyebaran tulisan untuk konsumsi publik, termasuk informasi yang tertuang pada buku teks, karya non-fiksi, surat kabar, dan berkata lainnya".

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa publikasi merupakan suatu kegiatan dalam menyampaikan dan menyebarluaskan pesan atau informasi yang berkaitan dengan lembaga atau organisasi kepada publik internal maupun eksternal dengan menggunakan media komunikasi sebagai saluran penyampaian pesan yang efektif.

Hubungan Masyarakat.

Dalam pelaksanaan program nasional ini Tim GNKPA dalam hal ini mengutamakan pendekatan dan dengan mempertajam hubungan kepada masyarakat sebagai penopang keberhasilan pelaksanaan sosialisasi GNKPA.

Adapun beberapa pengertian hubungan masyarakat menurut beberapa ahli :

Howard Bonham dalam Oemi Abdurrachman, (2001 : 25), menyatakan "*Public relations* adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik, yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang atau suatu organisasi atau badan".

Institute of Public Relation (IPR) dalam Frank Jefkins (2004 : 9), mengatakan "*Public relations* adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan kesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik (*good will*) dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya".

J.S.,Scidel dalam Oemi Abdurrachman (2001 : 24), berbunyi : "*Public relations* adalah proses yang kontinu dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh *good will* dan pengertian dari para langganannya, pegawai dan publik pada umumnya, ke dalam dengan mengadakan analisa dan perbaikan terhadap diri sendiri, keluar dengan mengadakan pernyataan-pernyataan".

Edward L. Bernays dalam Rachmadi (1996 : 19), menjabarkan pengertian hubungan masyarakat sebagai berikut :

- 1) Memberi penerangan kepada masyarakat.
- 2) Persuasi untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat.
- 3) Usaha untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan dengan sikap perbuatan masyarakat dan sebaliknya.

Dari beberapa definisi di atas, tentunya dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkelanjutan dalam membina hubungan timbal balik yang harmonis dengan publik internal maupun eksternal melalui komunikasi yang efektif untuk memperoleh saling pengertian yang pada akhirnya akan menciptakan niat baik (*good will*) dan citra positif dari publik menyangkut lembaga yang dikelola atau program yang dijalankan.

Pengertian Strategi

Thompson dalam Sandra Oliver (2007 : 7), mendefinisikan "Strategi sebagai cara untuk mencapai hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi".

Philip Kotler (2003 : 191) mengemukakan bahwa "Strategi adalah perekat yang bertujuan untuk membangun dan memberikan proposisi nilai yang konsisten dan membangun citra pada sasaran".

Hax dan Majluf dalam Iwan Purwanto (2008 : 73) menjabarkan rumusan yang komprehensif tentang strategi sebagai berikut :

- 1) Suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral.
- 2) Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya.
- 3) Menyeleksi bidang yang akan dilakukan organisasi.
- 4) Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, kekuatan dan kelemahannya.
- 5) Melibatkan semua tingkat hirarki dari organisasi.

Dapat ditarik kesimpulan, strategi adalah suatu cara atau langkah-langkah yang terencana dengan mengintegrasikan segala sumber daya dan kemampuan dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, strategi dapat dijadikan suatu cara atau langkah yang menjadi pegangan atau pedoman untuk bekerja, berupaya dan berbuat guna mencapai suatu tujuan.

Pengertian Strategi Hubungan Masyarakat

Rosady Ruslan (2002 : 121), mengatakan bahwa "Strategi *public relations* merupakan strategi yang dibentuk melalui dua komponen yaitu komponen sasaran merupakan satuan yang akan digarap dan komponen sarana yang merupakan paduan bauran sarana untuk menggarap sasaran".

Ahmad S. Adnanputra dalam Rosady Ruslan (2002 : 121), memberikan pengertian bahwa "Strategi *public relations* adalah

alternatif optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan *public relations* dalam kerangka suatu rencana *public relations*".

Widjaja (2008 : 59), mengatakan bahwa "Strategi pokok hubungan masyarakat merupakan suatu cara yang diarahkan untuk meningkatkan mekanisme komunikasi dua arah antara lembaga dengan sasaran hubungan masyarakat agar hasil-hasil yang dicapai oleh lembaga dapat dikenal oleh sasaran hubungan masyarakat, sehingga sasaran hubungan masyarakat akan ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan lembaga khususnya dan tujuan pembangunan nasional umumnya".

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa strategi hubungan masyarakat adalah suatu cara atau langkah terencana yang dilakukan oleh hubungan masyarakat dalam membina hubungan yang harmonis dan saling pengertian antara lembaga dengan publik baik publik internal maupun eksternal, melalui komunikasi dua arah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kerangka suatu perencanaan hubungan masyarakat.

Strategi Pendekatan Hubungan Masyarakat

Hubungan masyarakat berfungsi untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan tanggung jawab serta partisipasi antara pejabat hubungan masyarakat dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama melalui aspek pendekatan strategi hubungan masyarakat. Rosady Ruslan (2002 : 131) membagi strategi pendekatan hubungan masyarakat ke dalam lima pendekatan yakni strategi operasional, pendekatan persuasif dan edukatif, pendekatan tanggung jawab sosial hubungan masyarakat, pendekatan kerjasama dan pendekatan koordinatif dan integratif. Penjelasan mengenai strategi pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

Strategi Operasional

Melalui pelaksanaan program Pemerintah GERAKAN NASIONAL KEMITRAAN PENYELAMATAN AIR yang dilakukan dengan pendekatan kemasyarakatan melalui mekanisme sosial kultural dan nilai-nilai yang berlaku di

masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada opini publik atau kehendak masyarakat yang dilihat dari sikap masyarakat atau berkemampuan untuk mendengar (*listening*), dan bukan sekedar *hear* mengenai aspirasi yang ada di dalam masyarakat, baik menyangkut etika, moral maupun nilai-nilai kemasyarakatan yang dianut itu merupakan acuan dalam strategi operasional hubungan kemasyarakatan.

Pendekatan Persuasif dan Edukatif

Strategi pendekatan di sini dimaksudkan untuk menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada pihak publiknya, baik bersifat mendidik, memberikan pencerangan maupun dengan melakukan pendekatan persuasif agar tercipta saling pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi dan lainnya. Terkait hal tersebut, Rachmadi (1996 : 78), mengatakan bahwa "Pada dasarnya tugas hubungan masyarakat pemerintah adalah memberikan pencerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, langkah-langkah, dan tindakan pemerintah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa informasi yang diperlukan secara terbuka, jujur, dan obyektif".

Wilbur Schramm dalam Oemi Abdurrachman (2001 : 71), mengemukakan mengenai persuasi, yaitu :

"Bila persuasi menghendaki efek yang baik, maka dalam pendekatannya harus melalui AIDDA yaitu membangkitkan perhatian (*attention*) publik terlebih dahulu, hingga timbul rasa tertarik (*interest*), kemudian adanya keinginan (*desire*), yang disusul dengan keputusan (*decision*), untuk selanjutnya mengambil suatu keputusan (*action*)".

Pendekatan persuasif dan edukatif di sini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang paling efektif saat ini adalah kegiatan publikasi yang dilakukan melalui media hubungan masyarakat agar pesan yang ingin disampaikan dapat diketahui oleh publik sasarannya.

Pendekatan Tanggung Jawab Sosial Hubungan masyarakat

Menumbuhkan sikap bahwa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tersebut, bukanlah memperoleh keuntungan sepihak dari publik sasarannya, tetapi memperoleh keuntungan bersama. Dimana hal ini merupakan keterampilan dalam memadukan keuntungan dengan motivasi tanggung jawab sosialnya. Dalam hal ini, lebih jelas dikatakan oleh Maria Assumpta (2004 : 42), "Hubungan masyarakat merupakan instrumen untuk bertanggung jawab terhadap semua kelompok yang berhak terhadap tanggung jawab tersebut".

Rosady Ruslan (2007 : 76) juga mengatakan bahwa "Pihak perusahaan memiliki rasa, bahkan berkewajiban mengenai kepedulian perusahaan terhadap tanggung jawab sosial". Hal ini merupakan pengembangan dari aktivitas hubungan masyarakat mengenai kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara khususnya serta menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidupnya, baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Pendekatan Kerjasama

Berupaya membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan berbagai kalangan, baik ditujukan hubungan ke dalam (*internal relations*) maupun hubungan ke luar (*eksternal relations*) untuk meningkatkan kerjasama. Hubungan masyarakat berkewajiban memasyarakatkan misi instansi yang diwakilinya dan agar diterima oleh atau mendapat dukungan masyarakat atau publik sasarannya. Hal ini dilakukan dalam menyelenggarakan hubungan baik dengan publik untuk memperoleh opini publik dan perubahan sikap yang positif bagi kedua belah pihak (*mutual understanding*).

Pendekatan Koordinatif dan Integratif

Untuk memperluas peranan hubungan masyarakat di masyarakat, maka fungsi hubungan masyarakat dalam arti sempit hanya mewakili lembaga atau institusinya, tetapi peranan lebih luas berpartisipasi dalam menunjang program pembangunan nasional dan mewujudkan ketahanan nasional dibidang politik, ekonomi, sosial budaya (polteksosbud) dan hankamnas. Misalnya secara pro-aktif

mengkampanyekan program KB nasional, GNOTA, kadarkum dan kampanye sistem dialogis untuk menyukseskan pemilu melalui koordinasi BakoHubungan Masyarakat.

Pengertian Publik Eksternal

Frank Jetkins (2007: 80), mengartikan "Publik (khalayak) adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal".

Di sini publik terbagi menjadi dua yakni publik internal dan eksternal. Sedangkan menurut Onong Uchjana (1989 : 125), "External public (khalayak ekstern) adalah khalayak di luar organisasi yang menjadi sasaran kegiatan lembaga hubungan masyarakat tetapi ada kaitannya dengan organisasi".

Elvinaro Ardianto (2009 : 124), mengartikan "Publik eksternal adalah mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan dan berada di luar perusahaan".

Secara garis besar, publik eksternal adalah khalayak atau sekelompok orang di luar organisasi yang memiliki kepentingan yang sama pada organisasi tersebut. Publik eksternal merupakan sasaran suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai suatu tujuan.

Definisi Konseptional

Berdasarkan teori dan konsep yang telah dipaparkan, maka definisi konseptional dari strategi Tim GNKPA Kab. Kutai Kartanegara dalam mensosialisasikan program nasional pada publik eksternal adalah suatu cara atau langkah-langkah optimal yang ditempuh oleh Tim GNKPA Kab. Kutai Kartanegara dalam menyampaikan dan menyebarkan suatu informasi yang berkaitan dengan program nasional pada publik eksternal melalui pendekatan-pendekatan strategis dalam mencapai tujuan.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian/Perspektif Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, Hal ini dikarenakan data yang ingin disajikan oleh peneliti berupa cerita dari para

narasumber tentang pengalaman, opini, pengetahuan, tradisi, filsafat atau pandangan hidup seseorang. Dengan kata lain, penelitian dengan metode penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa uraian dalam bentuk tertulis atau lisan dari individu, kelompok maupun organisasi yang diamati (Bodgan & Taylor, 1992 : 22 dalam Moleong, 2002).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian deskriptif kualitatif di sini yaitu jenis penelitian yang berusaha memaparkan dan mendeskripsikan mengenai strategi Tim Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) Kab. Kutai Kartanegara dalam upaya mensosialisasikan program nasional yaitu GNKPA pada publik eksternal.

Ruang Lingkup/Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi. Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka yang menjadi fokus penelitian yaitu Strategi Tim Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) Kab. Kutai Kartanegara Dalam Upaya mengoptimalkan kegiatan sosialisasi GNKPA Pada Publik Eksternal melalui strategi pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Persuasif dan Edukatif.

Strategi Tim GNKPA Kab. Kutai Kartanegara dalam mensosialisasikan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air pada publik eksternal melalui media Cetak, seperti : Brusur dan Leaflet dan sejenisnya.

b. Pendekatan Kerjasama.

Dalam strategi pendekatan ini, peneliti memfokuskan penelitian pada membina hubungan ke luar yakni hubungan Tim GNKPA dengan masyarakat Partisipatif sekitar wilayah studi dalam upaya memasyarakatkan program GNKPA secara efektif dan efisien melalui pendekatan kerjasama.

Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian di sepanjang Bantaran Sub Daerah Aliran Sungai (SubDAS)

Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Tepatnya di Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu, Panji, Loa Ipuh, Loa Ipuh Dara dan Kelurahan Maluhu. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan dan mulai dilaksanakan pada awal bulan April 2010.

Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dibedakan atas data primer dan data sekunder :

1) Data Primer

Menurut Rachmat Kriyantono (2008 : 41), "Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau tangan pertama di lapangan".

Data primer diperoleh melalui nara sumber dengan cara melakukan tanya-jawab secara langsung dan dipandu melalui pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan sebelumnya oleh penulis.

2) Data Sekunder

Menurut Rachmat Kriyantono (2008 : 42), "Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Selain melengkapi, biasanya data sekunder sangat membantu peneliti bila data primer terbatas atau sulit diperoleh".

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi, antara lain :

- a. Dokumen-dokumen, laporan, catatan dan lain lain.
- b. Buku-buku ilmiah atau hasil penulisan yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai *key* informan atau sumber data dalam memperoleh data untuk penulisan Tesis ini. Pemilihan informan didasarkan pada subjek yang memiliki informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data. Di dalam penelitian ini penunjukan informan melalui beberapa teknik sampling yaitu :

1) Teknik *Purposive Sampling*

Menurut Kriyantono (2006 : 154), "*Purposive sampling* merupakan teknik yang mencakup orang-orang yang

diseleksi atas dasar kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian". Untuk memperoleh data yang diperlukan dapat dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut di analisis dengan kata-kata dan disusun dalam teks yang di perluas.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tim Pokja GNKPA Kecamatan Kab. Kutai Kartanegara berjumlah 5 orang.
- b. Tim Pokja GNKPA Kelurahan dan Masyarakat di 5 (lima) Kelurahan sekitar DAS Terpilih, yaitu Sungai Tenggarong, Masing-masing kelurahan berjumlah 5 orang.

2) Teknik *Snow Ball Sampling*

Menurut Kriyantono (2006 : 159), "Teknik ini adalah teknik penentuan yang sampel awalnya berjumlah kecil, kemudian berkembang semakin banyak. Orang yang dijadikan sampel pertama diminta memilih atau menunjuk orang lain untuk dijadikan sampel lagi, begitu seterusnya sampai jumlahnya banyak. Proses ini berakhir bila terjadi pengulangan informasi serta pertimbangan kecukupan informasi yang diperlukan di dalam penelitian".

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, antara lain :

- 1) *Library research* (penelitian kepustakaan), peneliti mengumpulkan data dari literatur dan mempelajari buku-buku petunjuk teknis serta teori-teori yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian skripsi ini.

Dalam hal ini ada beberapa buku yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian, antara lain peraturan-perundangan, panduan, petunjuk teknis buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan GNKPA Kab. Kutai Kartanegara.

- 2) *Field work research* (penelitian langsung ke lapangan) dengan cara :

- a. Observasi
Observasi dilakukan karena peneliti menghendaki data yang merupakan hasil dari melihat atau menyaksikan aktivitas yang dilakukan informan.
- b. Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)
Teknik wawancara dipilih karena peneliti menginginkan data yang lebih rinci. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur dengan pertanyaan yang terfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap dan mendalam.
- c. Dokumentasi
Teknik dokumentasi yang dimaksudkan di sini adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari catatan, data, foto, yang telah tersedia atau telah dibuat oleh pihak lain.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan model analisa interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) yang merupakan interaksi antar komponen penelitian selama proses penelitian :

- 1) Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian dan belum diolah.
- 2) Reduksi data
Proses reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.
- 3) Penyajian Data
Penyajian data dimaknai sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- 4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Kegiatan keempat adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Verifikasi merupakan kegiatan

pemikiran kembali untuk mengembangkan "kesempatan intersubjektif". Verifikasi dilakukan kontinyu sepanjang penelitian verifikasi, menganalisis dan mencari makna dari informasi yang dikumpulkan dengan mencari pola hubungan permasalahan yang muncul.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Letak Geografis Kab. Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu dari kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sekitar 27.263,10 Km² terletak antara 115⁰ 26' Bujur Timur sampai dengan 117⁰ 36' Bujur Timur dan 1⁰ 28' Lintang Utara sampai dengan 1⁰ 08' Lintang Selatan.

Kabupaten Kutai Kartanegara secara administratif berbatasan dengan :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur dan Selat Makasar.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Panajem Pasir Utara dan Kota Balikpapan.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat.

Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini terdiri dari 18 Kecamatan dan 227 desa/kelurahan.

Kemiringan Lahan

Kemiringan lereng merupakan faktor utama yang menentukan suatu daerah apakah layak untuk dibudidayakan atau tidak. Penggunaan lahan untuk kawasan fungsional seperti persawahan, ladang dan kawasan terbangun membutuhkan lahan dengan kemiringan dibawah 15%, sedangkan lahan dengan kemiringan diatas 40% akan sangat sesuai untuk penggunaan perkebunan, pertanian tanaman keras dan hutan.

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai kemiringan lereng dari 1% sampai lebih dari 40%. Secara umum dapat dikatakan bahwa kemiringan lahan di

Kabupaten Kutai Kartanegara berkorelasi positif dengan ketinggian, makin tinggi letak suatu areal maka kemiringannya semakin terjal.

Geologi dan Jenis Tanah

Kondisi geologi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagian besar dibentuk oleh batuan sedimen dan Aluvium yang terdiri dari lumpur, lempung, pasir dan kerikil. Batuan sedimen (tersier) terdiri dari beberapa formasi yaitu, *Paleogen, Panahuan Beds, Pulaubahang Beds, Balikpapan (Kutai Beds), Kampung Baru dan Dumaring Beds*. Endapan Aluvium umumnya bersifat lunak dan berdaya dukung untuk pondasi rendah. Sedangkan batuan sedimen bersifat agak keras-keras dan berdaya dukung sedang tinggi. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan kondisi iklimnya yang tergolong dalam tipe iklim tropika humida.

Iklim

Iklim wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat dipengaruhi oleh iklim tropis basah yang bercirikan curah hujan cukup tinggi dengan penyebaran merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat penggantian musim yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan. Iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara di pengaruhi oleh letak geografisnya yakni iklim hutan tropika humida dengan suhu udara rata-rata 26^o C. Jumlah curah hujan wilayah ini berkisar 2.000-4.000 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 130-150 hari/tahun. Umumnya hujan lebih banyak turun pada bulan Oktober sampai dengan bulan April dan biasanya disebut dengan bulan-bulan basah. Temperatur rata-rata berkisar antara 26^oC dengan perbedaan antara siang dan malam antara 5 - 7 derajat celsius. Curah Hujan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penggunaan lahan

Pada dasarnya penggunaan lahan suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua kegiatan sosial ekonomi penduduk. Pengenalan pola penggunaan lahan ini sangat diperlukan baik untuk memperoleh gambaran mengenai organisasi tata ruang maupun untuk

mengetahui pola distribusi kegiatan sosial ekonomi serta intensitas penggunaan lahan dan berbagai kegiatan yang ada. Akumulasi penduduk sebagian besar terdapat pada lokasi-lokasi yang dikembangkan oleh pemerintah, seperti : pusat perdagangan, pusat industri, lokasi transmigrasi, dimana daerah-daerah tersebut sudah mempunyai sarana dan prasarana yang memadai.

Sumber Daya Air

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 4 (empat) jenis perairan yaitu sungai, danau, rawa dan laut. Sungai Mahakam merupakan sungai induk dan sungai yang terpanjang, dengan panjang sekitar 920 Kilometer. Sungai ini masih sangat berperan sebagai urat nadi transportasi terutama untuk menuju Kecamatan Muara Wis dan Kecamatan Muara Muntai, serta sebagian besar kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Cabang-cabang sungai Mahakam sangat banyak dan salah satu diantaranya adalah sungai Belayan yang bermuara di Kecamatan Kota Bangun. Anak sungai Mahakam ini merupakan sarana transportasi utama menuju Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang. Jumlah sungai yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar 26 buah.

Sementara itu untuk danau berjumlah sekitar 26 buah (BPS Kukar, 2008). Danau-danau yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penghasil ikan yang paling utama, dimana luas keseluruhannya sekitar 29.000 hektar. Diantaranya terdapat 2 (dua) danau yang cukup terkenal sebagai penghasil ikan yaitu Danau Semayang dengan luas 13.000 hektar dan Danau Melintang dengan luas 11.000 hektar.

Perairan yang berupa rawa-rawa terdiri dari rawa pasang surut (*tidal swamp*) dengan luas 299.795 hektar tesebar di kecamatan wilayah pesisir (sekitar delta mahakam) dan rawa (*swamp*) seluas 269.171 hektar yang tersebar di sekitar Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kahala, dan Kecamatan Kembang Janggut.

Perairan laut terdapat di Kecamatan Anggana, Sanga-sanga, Muara Jawa, Samboja, Muara Badak dan Marangkayu.

Data mengenai panjang laut, kedalamanannya, luas laut dan kandungan potensinya, serta kecepatan arus laut sampai sekarang belum banyak diketahui dan diperkirakan 4.097 km² (bila dihitung 4 mil laut dari pantai sesuai UU no. 22 tahun 1999).

Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 550.027 jiwa (BPS Kukar, 2008). Bila dirinci menurut jenis kelamin, maka penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dibedakan bahwa penduduk dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 288.219 jiwa dan perempuan sebanyak 261.808 dengan sex ratio sebesar 110. Sex ratio umumnya dinyatakan sebagai perbandingan jumlah laki-laki per 100 perempuan. Secara umum, seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan karakter yang ada tidak berbeda dengan antar kecamatan, dimana umumnya sex rasionya berada di atas 100.

Kepadatan Penduduk dan Ketergantungan Angkatan Kerja

Pada tahun 2007 Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kepadatan penduduk sebesar 20,17 jiwa/km². Kecamatan Tenggarong dan Tenggarong Seberang merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi dengan jumlah kepadatan masing-masing adalah sebesar 182 jiwa/km² dan 113 jiwa/Km². Sedangkan terendah berada di Kecamatan Tabang sebesar 1 jiwa/ Km² dan Kecamatan Muara Wis sebesar 8 jiwa/ Km². Selengkapnya menyangkut kepadatan penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 12.

Pada tahun 2007 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 63,26% dan prosentase bukan angkatan kerja sebesar 36,74%. Sementara prosentase angkatan kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara antara tahun 2006-2007 mengalami peningkatan dari 55,64% menjadi 60,11%. Sedangkan penduduk yang mencari kerja pada kurun waktu yang sama sebesar 3,16% menurun sebesar 1,6% di tahun 2006.

Gambaran Umum Sungai Tenggarong

Wilayah Kecamatan Tenggarong terdiri atas perbukitan dewasa, dimana proses erosi vertikal dan horizontal cukup seimbang. Wilayah ini terdapat sungai Tenggarong yang muaranya ke sungai Mahakam. Sungai Tenggarong memiliki panjang ± 11 Km, Lebar 12 M s.d 36 M, kedalaman sisi tepi 1.80 M s.d 2,90 M, Kedalaman Tengah 1, 85 M s.d 3,00 M, debit air dipengaruhi kedalaman yaitu 6,254 M³/dtk s.d 0,335 M³/dtk dan merupakan sungai orde kedua dari sungai mahakam serta memiliki anak-anak sungai dibagian hulu, seperti sungai Saka kanan dan Saka Kiri. Sungai Tenggarong beserta anak-anak sungainya membentuk suatu sistem tangkapan air hujan tersendiri yang akhirnya disebut dengan Sub-DAS Tenggarong. Siklus hidrologi pada daerah ini di pengaruhi oleh curah hujan, kelembaban udara, bentuk morfologi, hutan dan pasang surut.

Curah hujan, kelembaban udara, presipitasi, penguapan dan pasang surut dipengaruhi oleh keadaan umum wilayah Kalimantan Timur, sedangkan infiltrasi dipengaruhi oleh keadaan morfologi (kemiringan/kelerengan) dan hutan, begitu juga jumlah debit aliran sungai Tenggarong akan dipengaruhi keadaan-keadaan di atas.

Dalam Sub-DAS Tenggarong terdapat aktivitas persawahan, pertambangan, pabrik tahu-tempe, penggergajian kayu, mandi-cuci-kakus (MCK), intake irigasi, sementara itu di dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Kutai No. 660.1/36/LH-III/1995 Tentang Penetapan Sungai Tenggarong Sebagai Air Golongan B/Kelas II.

Kualitas air sci. Tenggarong dengan pH air 3,81 s.d 7.70 (Pengukuran dengan kertas Lakmus) dipengaruhi oleh keadaan fisika, kandungan unsur-unsur kimia dan kandungan mikroorganisme yang ada dalam badan sungai.

Melihat kondisi dan situasi seperti itu bahwa aktivitas tersebut akan mempengaruhi kualitas air sungai Tenggarong sehingga diperlukan suatu pengelolaan air sungai yang bijaksana di dalam pengendalian dan penanggulangan pencemaran air.

Kondisi Sungai Tenggarong pada umumnya, pH air tidak memenuhi baku mutu air kelas II dan kekeruhannya cukup tinggi. Secara umum kondisi air sei, Tenggarong mengalami gangguan pada bagian yang terkena aktivitas manusia, air sei, Tenggarong secara umum pada kondisi asam di bawah baku mutu untuk golongan B/kelas II.

Visi dan Misi GNKPA Kabupaten Kutai Kartanegara

Kebijakan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara sejak pemberlakuan Otonomi Daerah telah mengarah pada konsep percepatan pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan seluruh komponen pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal.

Seiring dengan semangat reformasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) oleh pemerintah yang bersih (*clean government*), maka selayaknya semangat reformasi ini dijadikan sebagai ruh di dalam pembangunan termasuk pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu semangat penyelenggaraan pemerintah yang baik oleh suatu pemerintahan yang bersih menjadikan hasil-hasil pembangunan diarahkan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan memperhatikan isu dan permasalahan dalam pembangunan penyelamatan Sumber Daya Air maka VISI Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

Terwujudnya ketersediaan Sumber Daya Air di Kabupaten Kutai Kartanegara baik dari segi kuantitas dan kualitasnya dan didukung dengan keseimbangan siklus hidrologi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) serta dilakukan secara bersama-sama melalui partisipasi dan pemberdayaan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dan melalui penegakan hukum. Untuk mewujudkan VISI maka perlu disusun MISI yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan bayangan

kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan VISI di atas maka dirumuskan MISI GNKPA Kab. Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

- 1) Mengendalikan pembangunan pada wilayah DAS dan pertumbuhan penduduk dalam kerangka penataan ruang yang harmonis untuk mempertahankan kualitas dan menyelamatkan Sumber Daya Air.
- 2) Mendorong pemberdayaan dan partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan penyelamatan Sumber Daya Air secara adil dan efisien.
- 3) Merehabilitasi dan mengkonservasi Sumber Daya Air untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.
- 4) Mengendalikan kerusakan dan pencemaran air serta mendayagunakan Sumber Daya Air secara efektif dan berkelanjutan.

Temuan Penelitian dan Pembahasan Pendekatan Persuasif dan Edukatif

Strategi Tim GNKPA Kab. Kutai Kartanegara dalam mensosialisasikan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air pada publik eksternal melalui media Cetak, seperti : Brusur, Leaflet, selebaran (prospektus) dan sejenisnya tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan tersebut berupa Informasi yang disampaikan melalui media cetak tersebut di atas sebagaimana dilakukan oleh Tim GNKPA Kab. Kukar pada saat sosialisasi program ini sepenuhnya bersifat persuasif (mempengaruhi sikap masyarakat) dan edukatif (mendidik) kearah yang positif untuk dapat berpartisipasi dalam program pembangunan. Adapun kekurangan yang dirasakan oleh Tim GNKPA Kab. Kukar dari pemanfaatan media cetak ini diantaranya adalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh tim dalam upaya penyediaan dan penyeberluasan informasi dalam bentuk ini melihat kondisi wilayah Kab. Kutai Kartanegara yang begitu luas serta kurang begitu mudah dipahaminya oleh sebagian

masyarakat sajian informasi yang begitu singkat dan ringkas yang terdapat dalam media cetak tersebut. Berdasarkan data primer yang diperoleh bahwa pendistribusian media cetak belum dapat dipalungi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Media cetak tersebut di atas diharapkan dapat menjadi instrumen atau alat ukur keberhasilan tim dalam mensosialisasikan program pemerintah ini.

Pendekatan Kerjasama

Dalam strategi pendekatan ini, peneliti memfokuskan penelitian pada membina hubungan ke luar yakni hubungan Tim GNKPA dengan masyarakat Partisipatif sebagai publik eksternal sekitar wilayah studi dalam upaya memasyarakatkan program GNKPA secara efektif dan efisien melalui pendekatan kerjasama. Dalam pelaksanaan GNKPA di Kab. Kutai Kartanegara partisipasi masyarakat Sangat diharapkan, implementasi kebijakan pemerintah kearah ini keberhasilannya hanya dapat diukur dari peran serta masyarakat luas, dimana dalam menjalin hubungan baik diharapkan adanya hubungan saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan adanya ketidak-tahuan masyarakat akan GNKPA itu sendiri. Dari hasil wawancara kebanyakan dari responden yang mewakili masyarakat menjawab kegiatan GNKPA Belum optimal.

Partisipasi Masyarakat.

Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan wawancara yang mendalam, observasi dan dokumentasi terhadap masing-masing sampling responden sebagai publik eksternal sebanyak 30 orang dan masing-masing wilayah studi, yaitu : Kee. Tenggarong, Kelurahan Melayu, Panji, Loa Ipuh, Loa Ipuh Darat dan Kelurahan Maluhu diwakili oleh 5 orang responden yang terdiri dari Lurah, RT, Tokoh masyarakat dan Pokja GNKPA Kecamatan serta Kelurahan dengan 20 pertanyaan yang terstruktur sehingga antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan selanjutnya saling keterkaitan dan mendalam. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sebagai publik eksternal merupakan sumber data yang diharapkan peneliti untuk dapat memberikan gambaran

sebenarnya dari hasil kerja Tim GNKPA Kab. Kutai Kartanegara.

Dapat dijabarkan tanggapan responden secara umum bahwa dengan wawancara mendalam peneliti dapat mempelajari semua jawaban dari setiap responden yang pada dasarnya masyarakat merasa perlu adanya program GNPKA yang dicanangkan pemerintah di tempat mereka, bahkan masyarakat partisipatif sebagai publik eksternal ini sangat sejutu GNKPA ini terus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah studi yang terdiri dari : Tokoh masyarakat, Karang taruna, aparat pemerintah di desa / kelurahan dan lainnya. Dengan adanya GNKPA masyarakat mengharapkan dapat mengurangi resiko pencemarnya air dan menyelamatkan air sebagai sumber kehidupan. Namun kebanyakan responden berpendapat bahwa sampai sejauh ini peran tim GNKPA dan pemerintah Kabupaten dalam hal pelaksanaan GNKPA belumlah optimal sebagaimana diharapkan.

Strategi dan Kebijakan

Dengan memperhatikan visi dan misi sebelumnya maka untuk menetapkan strategi dan kebijakan dalam Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai langkah menindak lanjuti informasi yang diperoleh mengenai kondisi obyektif dilapangan perlu diidentifikasi hal-hal sebagai berikut :

Strategi

1. Kekuatan

- a. Adanya perangkat regulasi menyangkut pengaturan Sumber Daya Air dan penyelamatan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara: UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, PP No. 20/2006 tentang Irigasi, Peraturan Presiden No. 12/2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, Peraturan Menteri PU No. 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Sumber Daya

Air Provinsi, Kabupaten-Kota dan Tim Koordinasi Pengelolaan Wilayah Sungai.

- b. Potensi Sumber Daya Air di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi sungai, danau yang relatif melimpah termasuk DAS Mahakam, SubDAS Sungai Tenggarong, SubDAS Sungai Jembayan, Danau Semayang serta sumber air gunung lainnya.
- c. Telah terbentuknya Tim Koordinasi GNKPA di Tingkat Kabupaten.
- d. Adanya komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pemanfaat Sumber Daya Air untuk melakukan upaya penyelamatan air melalui kemitraan.

2. Kelemahan

- a. Kewenangan antar instansi yang berkaitan dengan penyelamatan sumber daya air termasuk Dinas PU, Dinas-Dinas dalam lingkup sektor pertanian dalam arti luas dan instansi-instansi terkait lainnya masih belum jelas.
- b. Belum mantapnya koordinasi antar instansi yang relevan dalam pembangunan Sumber Daya Air dan penyelamatan air.
- c. Belum adanya sistem drainase untuk wilayah pemukiman termasuk di wilayah kota.
- d. Masih terbatasnya prasarana dan sarana irigasi dan pertanian mendukung upaya-upaya penyelamatan air.
- e. Belum tegasnya penegakan hukum dalam kerangka pemanfaatan sumber daya air yang adil, efisien dan berkelanjutan.
- f. Kapasitas sumberdaya manusia untuk mengelola dan menyelamatkan air masih relatif rendah.
- g. Dukungan pendanaan pemerintah daerah (APBD) yang masih terbatas dalam pembangunan penyelamatan Sumber Daya Air.
- h. Terbatasnya data dan informasi mengenai kondisi sumber daya air

termasuk mengenai sumber sumber air dan kualitas perairan.

3. Peluang

- a. Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) merupakan komitmen nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 28 April 2005.
- b. Ketersediaan teknologi pengelolaan Sumber Daya Air yang lebih efisien.
- c. Semakin meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dewasa ini.
- d. Semakin kuatnya upaya pemerintah dalam rangka penegakan hukum termasuk untuk penyelamatan sumber daya air.

4. Ancaman

- a. Tingkat kerusakan sumber daya air yang mengkhawatirkan.
- b. Terancamnya ketersediaan air dan menurunnya kualitas perairan serta meningkatnya resiko terjadinya bencana alam yang diakibatkan rusaknya sistem hidrologi di DAS dan eksternalitas pembangunan yang kurang terkendali.
- c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kemitraan penyelamatan air.
- d. Belum optimalnya pengelolaan air untuk mendukung semua sektor termasuk pertanian dalam arti luas.
- e. Masih kurangnya pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air (PPA) sehingga menjadi lembaga pengelola air yang berorientasi bisnis dan mandiri.

Kebijakan

Adapun arahan kebijakan yang mendukung dalam program kemitraan penyelamatan air di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Keterpaduan implementasi keenam komponen kegiatan GN-KPA didasarkan atas perencanaan strategis yang terpadu dengan horizon jangka panjang sejalan

dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten.

2. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
3. Program mencakup dimensi sosial, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan serta budaya setempat.
4. Keberpihakan kepada masyarakat miskin dan yang terisih (*disadvantage groups*).
5. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya guna (*good effective water and environmental governance*).
6. Implementasi program tetap memperhatikan pelaksanaan otonomi daerah dan sumber daya lokal.
7. Menggunakan instrumen nilai dan harga air untuk mencapai keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan sumber daya air, dengan prinsip pengguna air membayar jasa pengelolaan sumber daya air sedangkan pencemar dikenakan biaya (*polluter pays principle*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Langkah yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu merupakan perwujudan dari strategi yang digunakan Tim GNKPA Kab. Kutai Kartanegara dalam mencapai sasaran. Dimana strategi tersebut merupakan tolak ukur dalam menentukan langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan selanjutnya yang lebih optimal.

Dari data yang diperoleh di lapangan, Tim GNKPA Kab. Kutai Kartanegara dalam melaksanakan sosialisasi menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan persuasif- edukatif dan pendekatan kerjasama. Pendekatan yang dilakukan oleh Tim GNKPA Kab. Kutai Kartanegara tersebut sudah cukup efektif dalam melaksanakan sosialisasi. Dalam hal ini, peneliti didukung oleh data-data yang dapat membantu peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pendekatan Persuasif dan Edukatif.

Sejauh ini strategi pendekatan ini berjalan dengan cukup baik. Strategi ini dapat dikatakan sebagai langkah strategis awal dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi. Hal ini dilihat dari kenyataan yang ada di lapangan bahwa Tim GNKPA Kab. Kutai Kartanegara mengoptimalkan penggunaan media cetak berupa leaflet, brosur dan selebaran dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi. Media eksternal ini efektif dari segi isi dan rubrikasi serta sasaran yang dituju. Namun, keterbatasan anggaran tentu menjadi penghambat dalam pendistribusian media ini ke seluruh masyarakat. Untuk mendukung hal di atas tersebut, Tim GNKPA Kab. Kutai Kartanegara memanfaatkan pendekatan langsung dalam bentuk kerjasama kepada masyarakat sebagai publik eksternal.

- 2) Pendekatan Kerjasama.

Sejauh ini, pendekatan ini telah menciptakan arus informasi yang baik dari pemerintah kepada publik eksternal baik bersifat mendidik, memberikan penerangan maupun dengan melakukan pendekatan persuasif agar tercipta saling pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi dan lainnya. Masukan berupa kritik maupun saran juga dapat disampaikan langsung ke Tim GNKPA Kab. Kutai Kartanegara.

- 3) Kecendrungan pelaksanaan program nasional yang selalu menunjukkan dan memberikan hasil yang tidak optimal.
- 4) Belum di terima dan dipahaminya apa itu GNKPA di masyarakat yang menghambat terlaksananya program GNKPA.
- 5) Adanya informasi dan masukan obyektif dari publik eksternal sebagai langkah-langkah baru yang menjadi strategi Tim GNKPA Kab. Kutai Kartanegara dalam upaya mengoptimalkan kegiatan sosialisasi GNKPA di masa yang akan datang.

Saran

- 1) Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan dunia usaha hendaknya

secara bersama-sama bertanggungjawab untuk menjaga sesuai dengan perannya maka seluruh komponen baik masyarakat, pemerintah dan dunia usaha harus bersungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar arah gerakan penyelamatan Sumber Daya Air di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu mewujudkan kecukupan kualitas dan kuantitas air, seimbang siklus hidrologis di wilayah DAS dan terlaksananya pengelolaan Sumber Daya Air secara adil, efektif, efisien dan berkelanjutan dapat tercapai.

- 2) Tim GNKPA Kab. Kutai Kartanegara siap menyediakan suatu wadah untuk menampung dan menanggapi masukan dari masyarakat.
- 3) Pemerintah dan Tim GNKPA Kab. Kutai Kartanegara lebih proaktif memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan GNKPA.
- 4) Program GNKPA hendaknya dapat diterima, dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sepenuh hati sebagai bentuk kesadaran dan kepedulian masyarakat akan kondisi sumber daya air yang merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurracman, Oemi, M.A. 2001. Dasar-Dasar Public Relations. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Bland Michael, Alison Theaker, dan David Wragg. 2004. Hubungan Media yang Efektif. Jakarta : Erlangga.
- Cutlip, Scott M, dkk. 2006. Effective Public Relations. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Direktorat Sungai, Danau dan Waduk Dirjen Sumber Daya Air- Dept. Pekerjaan Umum, 2006. Panduan Pelaksanaan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA). Jakarta. Direktorat Sungai Danau dan Waduk Dirjen Sumber Daya Air.
- Effeandy, Onong Uchjana. 1989. Kamus Komunikasi. Bandung : Mandar Maju.
- Krisyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Laporan PROKASIH Sungai Tenggarong, 2007. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Kutai Kartanegara.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Purwanto, Iwan, SE. M.Pd. 2008. Manajemen Strategi. Bandung : Yrama Widya.
- Rachmadi, F. 1996. Public Relations dalam Teori dan Praktek. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Ruslan, Rosady, SIL., MM. 2007. Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Oliver, Sandra. 2007. Strategi Public Relations. Jakarta : Erlangga.
- Soemirat Soleh dan Elvinaro Ardianto. 2004. Dasar-Dasar Public Relations. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumber Lain :**
- Soerjono Soekanto, 2009 : "Pengertian Sosialisasi" (online), <http://budakbangka.blogspot.com/2010/01/pengertian-sosialisasi.html>, 27 Februari 2010.
- Materi Referensi, 2009. Pengertian Sosialisasi Menurut Para Ahli. (pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi), 27 Februari 2010.